



BPK Temukan Kerugian Negara Rp 1,4 Triliun

Belanja Infrastruktur Kementerian Energi Menjadi Salah Satu Sorotan

JAKARTA — Hasil audit Badan Pemeriksa selama semester II tahun 2014 menemukan 3.293 masalah berdampak finansial senilai Rp 14,74 triliun. Angka itu terdiri atas kerugian negara Rp 1,42 triliun, potensi kerugian negara Rp 3,77 triliun, dan kekurangan penerimaan senilai Rp 9,55 triliun.

“Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2014 itu, ditemukan 7.950 masalah yang terdiri atas berbagai temuan,” ujar Ketua BPK Harry Azhar Azis pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. Ribuan masalah itu terdiri atas 7.700 lebih masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 40,55 triliun dan hampir 2.500 masalah kelemahan sistem pengendalian internal.

Salah satu yang menjadi sorotan BPK adalah belanja infrastruktur di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan 137 kontrak proyek pembangunan transmisi dan gardu induk. Proyek terhenti karena pembebasan lahan berlarut-larut, sehingga izin kontrak tahun jamak tidak diperpanjang.

Walhasil, kata Harry, proyek pembangunan transmisi dan gardu induk senilai Rp 5,38 triliun tak bisa dimanfaatkan. “Ada kerugian negara senilai Rp 562,66 miliar,” ucapnya.

Juru bicara Kementerian Energi, Saleh Abdurahman, enggan mengomentari temuan BPK. “Kami belum mengetahui hasil audit itu. Besok (hari ini) kami akan

tindaklanjuti,” tuturnya ketika dihubungi.

Pada periode yang sama tahun 2013, BPK menemukan kerugian negara Rp 1,78 triliun. Terkait dengan hal ini, anggota BPK, Achsanul Qosasi, menilainya sebagai prestasi. “Dalam pengelolaan keuangan, aparat pemerintah lebih hati-hati,” tuturnya.

Perbaikan pengelolaan keuangan itu, menurut Achsanul, juga karena BPK lebih ketat dan tegas dalam menindaklanjuti hasil temuan. “Kalau ada temuan yang berulang, kami akan laporkan ke penegak hukum.”

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Firdaus Ilyas, mengatakan temuan BPK harus ditindaklanjuti dengan audit investigasi untuk menguji ada tidaknya indikasi korupsi. “Karena pemeriksaan dalam audit BPK ini sangat terbatas dan tak cukup dalam,” ujarnya.

Firdaus meminta Komisi Pemberantasan Korupsi bersikap proaktif dengan mencari alat bukti lain sehingga hasil temuan itu bisa menjadi bukti pelanggaran peraturan dan penyalahgunaan kewenangan.

● ADITYA BUDIMAN | DEVY ERNIS



TEMPO/DHEMAS REVIYANTO

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis (ketiga kiri) memberikan laporan hasil pemeriksaan BPK kepada Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (ketiga kanan) dalam rapat paripurna DPR kemarin.

HILANG TRILIUNAN RUPIAH

Pada semester II 2014, dari pemeriksaan pada 651 obyek, BPK menemukan 3.150 pemborosan anggaran bernilai Rp 25,81 triliun. Dari jumlah itu, yang berhasil diselamatkan Rp 461,11 miliar.



KERUGIAN NEGARA SEMESTER II 2014 (DALAM RP TRILIUN)

	Pemerintah Pusat	Pemda dan BUMD	BUMN dan Badan Lainnya	Total
1. Kerugian Negara	0,75	0,58	0,09	1,42
2. Potensi Kerugian	0,51	2,57	0,69	3,773
3. Nilai temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan penyetoran aset ke kas negara	0,04	0,09	0,33	0,46

Keterangan:

Obyek pemeriksaan: 651 (135 pemerintah pusat, 479 pemerintah daerah dan BUMD, 37 BUMN dan badan lainnya.)

SUMBER: IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II-2014, BPK